

BAB I

PENDAHULUAN

II Latar Belakang Masalah

Bagi manusia, tanah merupakan hal terpenting bagi hidup dan kehidupannya. Diatas tanah, manusia dapat mencari nafkah seperti bertani, berkebun, dan berternak. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Tanah dan pola pemilikannya bagi masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat pedesaan merupakan faktor penting bagi perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, politik. Disamping itu pula ketimpangan pemilikan tanah yang memperlihatkan secara kontras kehidupan sebagian kecil penduduk pedesaan sebagai pemilik lahan yang luas menjadi makmur dan sejahtera, dengan mayoritas penduduk pedesaan yang tidak memiliki tanah atau lahan menjadi semakin miskin.¹

Pemilikan tanah bagi petani sudah merupakan penentu status dan lapisan sosial. Sebagai barang yang pada prinsipnya tidak bisa diperbanyak, tanah bagi petani merupakan faktor produksi tempat tinggal dan semakin mempunyai arti eksistensiil jika tanah semakin sedikit. Dengan alasan tersebut mempunyai tingkat keterikatan emosional yang tinggi meskipun ia sendiri tidak identik dengan hak milik dalam pengertian legal. Di negara yang padat penduduknya, bagi petani kecil yang tidak mempunyai pilihan kerja lain, tanah merupakan faktor produksi

¹ Rauf A. Hatu. 2010. Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perkebunan Tebu Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Perubahan Sosial Petani Di Kecamatan Tolanghula Kabupaten Gorontalo). Disertasi. Malang: Program Doktor Ilmu Pertanian Minat Sosiologi Pedesaan. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

penting disamping sebagai lapangan kerja. Karena itu keinginan pokok mereka adalah “mempertahankan tanah”.²

Sistem pertanian pada masyarakat desa yang dominan pertanian sangatlah vital artinya bagi kehidupan mereka. Sistem pertanian bagi mereka adalah merupakan cara bagaimana mereka bisa hidup. Terlebih untuk masyarakat desa yang masih bersahaja, yang kehidupannya tergantung sepenuhnya pada pertanian. Maka bagi masyarakat desa semacam itu, sistem pertanian adalah identik dengan sistem perekonomian mereka, yakni bila ekonomi diartikan sebagai cara “pemenuhan keperluan jasmani manusia”. Sejauh ini digeneralisasi secara umum, desa-desa di Indonesia umumnya adalah pertanian.³

Dari data BPS tahun 2011, luas lahan sawah di Kabupaten Bone Bolango sebesar 2.020 hektar dan lahan bukan sawah seluas 53.211 hektar. Berdasarkan data tentang keadaan luas areal lahan baik sawah maupun bukan sawah di wilayah Bone Bolango terlihat bahwa kondisi luas lahan sangat mendukung masyarakat khususnya masyarakat petani dalam melakukan usaha dalam bidang pertanian.

Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan telah menggeser pemanfaatan lahan yang akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan lahan yang semula berfungsi sebagai lahan pertanian, berangsur-angsur berubah menjadi lahan non pertanian. Proses alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, selain menghilangkan kesempatan berproduksi pangan dan aktifitas pertanian lainnya juga semakin mengurangi kesempatan usaha, yang

² Ulrich Planck. 1993. Sosiologi Pertanian. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hlm 41

³ Rahardjo. 2010. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 146

pada akhirnya mengancam pendapatan petani. Kemudian dengan terjadinya alih fungsi lahan tersebut luas lahan sawah semakin menyempit.

Fenomena yang selama ini terjadi menunjukkan bahwa pada dasarnya proses pembangunan di pedesaan di tandai dengan berbagai perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat misalnya berubahnya sektor pertanian ke sektor non pertanian.⁴ Aktivitas pembangunan yang berlangsung di segala bidang menyebabkan peningkatan kebutuhan jumlah lahan yang tidak sedikit. Pembangunan ini pada akhirnya menyebabkan lahan yang dapat dimanfaatkan semakin terbatas. Kondisi demikian pula yang terjadi terjadi dalam pembangunan kanal di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango yang dimulai pada tahun 2007 silam. Pembangunan Kanal Tamalate-Bone merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah untuk menanggulangi banjir yang setiap tahun melanda Kota Gorontalo dan daerah sekitarnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa pembangunan kanal tentunya membutuhkan lahan yang tidak sedikit jumlahnya.

Berdasarkan penjelasan Pejabat Biro Pemerintahan Provinsi, pembangunan Kanal Tamalate-Bone yang terdapat di Kecamatan Kabila membutuhkan lahan seluas 142.500 meter persegi. Namun dalam kenyataannya pembangunan kanal tersebut belum terselesaikan dengan baik karena masih adanya penolakan keras dari masyarakat di Kelurahan Oluhuta yang tidak mau memberikan lahannya untuk di jadikan sebagai area pembangunan kanal. Lahan yang digunakan untuk pembangunan kanal di Kelurahan Oluhuta terdiri dari lahan sawah seluas 26.314,15 meter persegi dan luas lahan bukan sawah 58.900 meter

⁴ Rauf A. Hatu. *Op.cit* Hlm 2

persegi. Situasi ini tentunya menimbulkan kesulitan bagi petani yang tentunya dapat mengancam pendapatan petani, selain itu juga dapat menyebabkan menyempitnya luas lahan pertanian. Adapun permasalahan tersebut seringkali menghiasi berbagai media, diantaranya yaitu:

TOLAK PEMBANGUNAN KANAL WARGA GELAR SUMPAAH ADAT⁵

Warga Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Kamis malam. Selain diikuti warga yang menjadi korban pembangunan kanal, pelaksanaan sumpah adat juga melibatkan tokoh adat dan agama setempat. Sumpah adat yang digelar di lapangan terbuka dan hanya diterangi dengan cahaya obor berlangsung selama 3 jam dipimpin sesepuh adat.

Menurut koordinator aksi, Iskandar Makmur sumpah adat ini merupakan puncak protes terhadap pemerintah provinsi Gorontalo setelah rencana pembangunan kanal sepanjang 2800 meter berulang kali ditolak warga karena solusi yang ditawarkan kepada warga korban pembangunan kanal dinilai merugikan warga.

Bahkan dalam kesempatan ini sejumlah ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok petani wanita, mendklairkan diri sebagai pasukan berani mati menolak pembangunan kanal. Pembangunan kanal pengendali banjir senilai Rp 54 miliar tersebut dicanangkan oleh Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad pada saat terjadi banjir besar di Gorontalo tahun 2007 silam.

Pembangunan kanal saat ini sudah menjadi pembicaraan dan permasalahan di kalangan masyarakat Gorontalo khususnya bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila, sehingga mendorong penulis untuk mengadakan penelitian tentang dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kanal, agar menjadi sebuah bahan pembelajaran bagi seluruh masyarakat Gorontalo lebih khususnya bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

⁵ Tolak Pembangunan Kanal Warga Gelar Sumpah Adat. [online]http://www.indosiar.com/fokus/warga-gelar-sumpah-adat_80949.html diakses tanggal 03 Februari 2013

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses alih fungsi lahan pertanian menjadi kanal di Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila ?
2. Bagaimana keadaan petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi kanal di Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila ?
3. Apa dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kanal di Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses alih fungsi lahan pertanian menjadi kanal di Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila
2. Untuk mengetahui keadaan petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan pertanian menjadi kanal di Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila
3. Untuk mengetahui dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kanal di Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu :

1. Bagi insan akademik, selain bisa memperdalam wawasan, juga untuk dapat melatih menjadi peneliti yang baik, serta lebih memperbanyak pengetahuan tentang dampak alih fungsi lahan pertanian

2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya yang berkaitan dengan masalah alih fungsi lahan pertanian
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat mengubah cara pandang masyarakat bahwa pembangunan kanal tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi justru masyarakatlah yang menentukan keberhasilan pembangunan tersebut.

1.5 Penelitian Terdahulu

Untuk lebih mempermudah penulis dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh **Astri Lestari** mengenai Dampak Sosio-Ekonomis Dan Sosio-Ekologis Konversi Lahan Pertanian Di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.⁶ Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa tipe konversi lahan yang terjadi di Desa Tugu Utara terdiri dari tiga dimensi yaitu konversi lahan dilihat dari letak kawasan (terbuka atau tertutup), tingkat kecepatan terjadinya konversi (lambat atau cepat) dan pihak pelaku konversi (warga lokal dan atau pemilik modal). Ketiganya dirangkum menjadi dua tipe yaitu 1) Tipe I, konversi lahan yang terjadi secara terbuka dengan laju konversi yang cepat dan pelaku konversi lahan semua stakeholder (warga lokal, pemilik modal dan pemerintah) dan 2) Tipe II, konversi lahan yang terjadi secara tertutup dengan laju konversi yang lambat dan pelaku konversi sebagian besar dilakukan oleh pemilik modal. Kampung Sampay yang letak kawasannya berada

⁶ Astri Lestari. 2011. Dampak Sosio-Ekonomis Dan Sosio-Ekologis Konversi Lahan Pertanian (Studi Kasus Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor). Skripsi. Bogor : Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

dekat dengan jalan raya mengalami konversi lahan Tipe I, sedangkan Kampung Sukatani yang letak kawasannya berada jauh dari jalan raya mengalami konversi lahan Tipe II.

Dampak konversi lahan terhadap kondisi sosio-ekonomis rumah tangga disekitar konversi antara lain perubahan struktur agraria, perubahan kesempatan kerja baik di sektor pertanian maupun diluar sektor pertanian, perubahan pola kerja, struktur pendapatan yang diperoleh, kondisi tempat tinggal, perubahan hubungan antar anggota keluarga dan hubungan antar warga. Terdapat perbedaan dampak yang diterima oleh Kampung Sampay dan Kampung Sukatani. Kampung Sampai yang mengalami konversi lahan Tipe I mengalami dampak lebih buruk dari keenam aspek di atas dibandingkan dengan Kampung Sukatani yang mengalami konversi lahan Tipe II. Akan tetapi secara umum dampak konversi lahan bagi kondisi sosio-ekonomis rumah tangga mengalami perubahan kearah negatif yaitu menjadi buruk. Pemetik manfaat utama dari kegiatan konversi lahan ini adalah pihak luar, sementara warga lokal kurang mendapat manfaat dari kegiatan konversi lahan. Hasil dari lapangan membuktikan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa “proses konversi lahan mengubah pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal”.

Dampak sosio-ekologis konversi lahan terhadap kawasan yang terkena konversi dilihat dari akses rumah tangga terhadap air, cara warga membuang limbah rumah tangga yang merupakan dampak tidak langsung dari konversi lahan pertanian, gangguan kebisingan dan kemacetan serta terjadinya degradasi lingkungan seperti banjir dan longsor. Seperti halnya dengan dampak sosio-

ekonomis, dampak sosio-ekologis bagi kawasan Kampung Sampay juga lebih buruk dibandingkan Kampung Sukatani. Secara umum Desa Tugu Utara mengalami dampak buruk pada kondisi sosio-ekologis akibat konversi lahan, karena kondisi lingkungan yang semakin menurun sehingga menimbulkan adanya bencana banjir dan longsor di kawasan yang berada di bagian hulu DAS Ciliwung ini. Kondisi ini membuktikan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa “proses konversi lahan menimbulkan akibat-akibat yang mengarah pada krisis ekologi di lokasi terjadinya konversi lahan”.

Penelitian **Rubyani Indrawan Putri** mengenai Konversi Lahan Dan Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Implikasi Tata Guna Lahan Pada Masyarakat Perkotaan (Proses Pembentukan Kampung Pengarengan Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur).⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa konversi lahan yang terjadi di Kampung Pengarengan dari lahan rawa sebagai daerah resapan air menjadi suatu pemukiman tidak hanya memberikan dampak terhadap struktur agraria, tetapi juga dampak ekologi yang dirasakan baik oleh penduduk kampung ataupun oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Pulomas. Dampak yang ditimbulkan terkait perubahan terhadap struktur agraria di lahan Kampung Pengarengan adalah perubahan sistem penguasaan lahan dan perubahan nilai orientasi lahan. Perubahan sistem penguasaan lahan di Kampung Pengarengan berubah dari Tipe Sosialisme menjadi Tipe Populisme. Perubahan nilai orientasi lahan yang terjadi di Kampung Pengarengan merupakan perubahan nilai sosial terhadap lahan yang menjadi

⁷ Rubyani Indrawan Putri. 2008. Konversi Lahan Dan Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Implikasi Tata Guna Lahan Pada Masyarakat Perkotaan (Proses Pembentukan Kampung Pengarengan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung). Skripsi. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

melemah diakibatkan meningkatnya nilai ekonomis terhadap lahan oleh penduduk Kampung Pengarengan. Pembentukan Kampung Pengarengan sebagai salah satu bentuk konversi lahan di perkotaan juga memberikan dampak terhadap tata guna lahan di perkotaan. Dampak yang timbul terhadap tata guna lahan adalah penyimpangan terhadap Rancangan Tata Ruang Wilayah yang sudah ditetapkan untuk Kampung Pengarengan dan sekitarnya dalam Surat Keputusan Gubernur no 1459 tahun 1992. Fungsi lahan di Kampung Pengarengan sebenarnya adalah sebagai Keperuntukan Untuk Taman (KUT). Timbulnya Kampung Pengarengan menunjukkan salah satu penyimpangan yang terjadi dari fungsi taman menjadi pemukiman. Penyimpangan kedua yang mungkin akan terjadi di Kampung Pengarengan adalah apabila PT. Pulomas Jaya merealisasikan program pembangunan *Business and Culture Complex* diatas lahan Kampung Pengarengan dan Kampung Pedongkelan dalam rangka pengoptimalisasian lahan yang dimiliki oleh PT. Pulomas Jaya.

Penelitian **Fandi Hidayat** mengenai Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Di Kabupaten Gowa Provinsi Sul-Sel Dengan Menggunakan Citra Satelit Landsat 5 TM (Studi Kasus Wilayah Kecamatan Sombaopu dan Palangga).⁸ Penelitian tersebut menyatakan bahwa Pemanfaatan data penginderaan jauh dapat diartikan sebagai teknologi untuk mengidentifikasi suatu obyek di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung dengan obyek tersebut. Saat ini teknologi penginderaan jauh berbasis satelit menjadi sangat populer dan digunakan untuk berbagai tujuan kegiatan, salah satunya untuk mengidentifikasi

⁸ Fandi Hidayat. 2012. Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Di Kabupaten Gowa Provinsi Sul-Sel Dengan Menggunakan Citra Satelit Landsat 5 TM (Studi Kasus Wilayah Kecamatan Sombaopu dan Palangga). Skripsi. Makassar : Fakultas Pertanian Universitas Hasanudin

perubahan lahan pertanian disuatu wilayah. Kecamatan Sombaopu dan Kecamatan Pallangga merupakan daerah yang mengalami perubahan lahan pertanian yang sangat signifikan seiring perkembangan dan penambahan penduduk, menurut data statistik kabupaten Gowa tahun 2010, lahan pertanian kecamatan Sombaopu dan Pallangga berkurang, yaitu pada tahun 1996 lahan pertanian di kedua kecamatan ini sebesar 11.006 ha dan pada tahun 2010 sebesar 7.933 ha atau berkurang sebesar 14 %. Faktor yang mempengaruhi berkurangnya lahan pertanian di kedua kecamatan ini antara lain yaitu peningkatan jumlah penduduk maka dengan sendirinya pemukiman akan bertambah, kemudian adanya dinamika perkotaan dimana kedua kecamatan ini terletak di daerah ibu kota kabupaten Gowa sehingga pembangunan daerah ke perkotaan tidak dapat di hindari. Hasil dari penelitian ini pada tahun 1996 lahan pertanian kecamatan Sombaopu dan Pallangga 10.525,7 ha berkurang menjadi 8.117,39 ha dengan laju perubahan lahan pertanian tahun 1996 sampai 2010 yaitu 183,41 ha pertahun. Nilai keakuratan klasifikasi citra tahun 2010 sebesar 88 % sedangkan overall untuk semua perubahan lahan sebesar 80,4%.